

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



## **BPK Serahkan LHP PKN pada PT Pertamina (Persero) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada Bareskrim Polri**

**Jakarta, Selasa (29 Oktober 2024)** – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyerahkan dua Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) kepada Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri di Kantor Pusat BPK RI, hari ini (29/10). Dua laporan itu adalah LHP Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara (PKN) atas Pembelian Tanah yang Berlokasi di Komplek Rasuna Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan pada PT Pertamina (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya, serta LHP Investigatif dalam rangka PKN atas Pemberian Pembiayaan kepada PT Sinergi Asia Perkasa (SAP) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya.

Kedua pemeriksaan tersebut dilaksanakan BPK berdasarkan atas permintaan penghitungan kerugian negara dari Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa:

- a. Adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam perkara Pembelian Tanah yang Berlokasi di Komplek Rasuna Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan pada PT Pertamina (Persero) yang mengakibatkan kerugian negara pada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp348,69 miliar; dan
- b. Adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam Pembiayaan kepada PT Sinergi Asia Perkasa oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang mengakibatkan kerugian negara pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp27,72 miliar.

Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Auditor Utama Investigasi, **I Nyoman Wara**, kepada Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, **Cahyono Wibowo**. “Besar harapan kami Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dapat memanfaatkan hasil penghitungan kerugian negara ini untuk proses penyidikan kasus dimaksud,” jelas I Nyoman Wara.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli, disebutkan bahwa BPK melaksanakan Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

**Biro Humas dan Kerja Sama Internasional**

#BPKKawalKeuanganNegara  
#BPKBerantasKorupsi  
#TransparansiKeuangan  
#PemberantasanKorupsi